WALIKOTA BIMA

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.2.2/4329 / BKPSDM/ VIII / 2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Bima membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan ketentuan sebagai berikut:

A. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi : 132 Formasi, *terdiri dari :*

1. **Tenaga Kesehatan: 31 formasi** dengan rincian sebagai berikut :
   a. Formasi Umum : 31 formasi
   b. Formasi Khusus Disabilitas : - formasi
2. **Tenaga Teknis: 101 formasi** dengan rincian sebagai berikut :
   a. Formasi Umum : 98 formasi
   b. Formasi Khusus Disabilitas : 3 formasi
3. Rincian Formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir.

B. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang IVIanajemen Pegawai Negeri Sipil jo.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas

Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini.

C. KRITERIA PELAMAR BERDASARKAN JENIS FORMASI

1. Formasi Umum

Formasi yang dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi umum di jabatan tertentu dan wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas pada saat pelamaran di SSCASN;

2. Formasi Khusus Disabilitas

Formasi yang dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik tetapi mampu melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan kriteria mampu melakukan tugas sesuai jabatan yang di lamar.

D. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum

a. warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut :
   - lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
   - lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

h. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
j. berkelakuan baik;
k. tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
l. bersedia mengabdi pada Pemerintah Kota Bima dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Disamping persyaratan umum sebagaimana angka 1 di atas, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
b. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
c. dalam hal Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melamar pada jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang (Pyb).

2. Persyaratan Khusus

a. Jabatan Fungsional Kesehatan
   Pelamar pada jabatan fungsional kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR kecuali Jabatan tertentu sesuai Kepmenpan RB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024.
b. Penyandang Disabilitas
   Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas selain menyatakan sebagai penyandang disabilitas pada saat pelamaran di SSCASN, dibuktikan dengan :
   - surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
   - video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

E. PELAMARAN

Pelamaran seleksi Pengadaan CPNS hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi, 1 (satu) jenis jabatan dan 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS atau PPPK) pada tahun anggaran yang sama, dan dilakukan secara daring melalui SSCASN yaitu ***https://sscasn.bkn.go.id*** disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik dengan tata cara sebagai berikut.

1. pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
2. membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL;
3. pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman SSCASN;
4. pelamar memilih jenis kebutuhan formasi dan jabatan dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik.
5. pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan pendaftaran yang terdiri dari :
   a. asli KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);

b. pas foto terbaru berwarna, pakaian formal dengan latar belakang merah;
c. asli surat lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai (*format sesuai lampiran II pengumuman ini);*
d. asli surat pernyataan 5 (lima) poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai *(format sesuai lampiran III pengumuman ini);*
e. asli surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kota Bima paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai *(format sesuai lampiran IV pengumuman ini);*
f. asli ijazah sesuai kualifikasi pendidikan jabatan dilamar;
g. asli transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan dilamar;
h. bukti akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi oleh BAN-PT dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes atau tangkapan layar (screenshot) pada pangkalan data pendidikan tinggi/BAN-PT pada saat kelulusan (khusus ijazah yang tidak mencantumkan status akreditasi), apabila pada ijazah tercantum status akreditasi dapat mengunggah kembali ijazah;
i. pelamar formasi jabatan fungsional kesehatan menyertakan unggahan dokumen asli STR sesuai dengan jabatan yang dilamar, dan masih berlaku pada saat pelamaran dengan dibuktikan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR kecuali Jabatan yang tidak mempersyaratkan STR sesuai Kepmenpan RB Nomor 322 Tahun 2024;
j. penyandang disabilitas menyertakan unggahan dokumen:
   - asli surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
   - link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

Perhatian : Seluruh Dokumen Persyaratan Administrasi pelamar CPNS tahun anggaran 2024 sebagaimana tersebut di atas harus dipindai/discan dokumen asli (bukan fotocopy) menggunakan alat pemindai/scanner berwarna/full color (bukan hitam putih dan tidak difoto menggunakan kamera/HP) dengan hasil scan lengkap/full tanpa terpotong.

F. SELEKSI

Tahapan Seleksi pengadaan CPNS terdiri atas :
1. seleksi administrasi;
2. seleksi kompetensi yang terdiri atas :
   a. seleksi kompetensi dasar (SKD) meliputi :
      - tes wawasan kebangsaan;
      - tes intelegensia umum; dan
      - tes karakteristik pribadi
   b. seleksi kompetensi bidang (SKB);

   yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;

G. LAYANAN BANTUAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2024, Panitia membentuk unit layanan bantuan informasi (helpdesk) melalui melalui :
1. Kantor BKPSDM Kota Bima, Jl. Soekarno-Hatta No.2 Kec. Mpunda Kota Bima, pada hari kerja pukul 08.00 - 16.00 WITA, dengan istirahat pukul 12.00-13.00 WITA;

2. Website : https://bkpsdm.bimakota.go.id/
3. Facebook : Bkpsdm Kota Bima

H. IMPLEMENTASI E-METERAI

SSCASN mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya. Pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website Distributor atau Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian, antara lain :

1. PT Peruri Digital Security (PSD) (https://e-meterai.co.id/)
2. PT Finnet Indonesia (https://finnet.e-meterai.co.id/)
3. PT Mitra Pajakku (https://e-meterai.pajakku.com/)
4. PT Mitracomm Ekasarana (https://mitracomm.e-meterai.co.id/)
5. Koperasi Pegawai Swadharma (https://swadharma.e-meterai.co.id/)

I. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	CAT oleh Peserta Seleksi 23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025

28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

J. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan CPNS Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Pelamar harus membaca dengan cermat setiap poin pada pengumuman ini, kesalahan yang diakibatkan kelalaian pelamar pada saat pendaftaran menjadi tanggung jawab pelamar.
4. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggahan yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
5. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir, namun terdapat kekeliruan pada formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan dan lain-lain yang menyebabkan Nomor Induk Pegawai tidak dapat diproses, maka Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
7. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai, maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
8. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Informasi terkait pengumuman pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bima tahun Anggaran 2022 dapat dilihat melalui media :
   a. Website : https://bkpsdm.bimakota.go.id/
   b. Facebook : Bkpsdm Kota Bima
   c. Instagram : bkpsdm.kotabima
10. Hal-hal yang belum dimuat dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kota Bima, 19 Agustus 2024

Pj. WALIKOTA BIMA,

Drs. MUKHTAR, MH

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
B	**TENAGA TEKNIS**	**101**			
1	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	1	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 MANAJEMEN / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA	WALIKOTA BIMA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | BIDANG PENCEGAHAN	
2	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	2	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA	WALIKOTA BIMA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENAGIHAN DAN PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH	
3	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA	WALIKOTA BIMA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG BARANG MILIK DAERAH	
4	AUDITOR AHLI PERTAMA	7	D-IV ADMINISTRASI PAJAK / D-IV AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK SIPIL	WALIKOTA BIMA | INSPEKTORAT	
5	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	S-2 ADMINISTRASI PAJAK / S-2 AKUNTANSI / S-2 EKONOMI / S-2 HUKUM / S-2 ILMU AKUNTANSI / S-2 ILMU HUKUM / S-2 TEKNIK SIPIL	WALIKOTA BIMA | INSPEKTORAT	
6	OPERATOR ALAT BERAT	1	SMK/MAK TEKNIK ALAT BERAT	WALIKOTA BIMA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI DAN PERALATAN	TIDAK DAPAT DIISI PELAMAR DISABILITAS
7	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	
8	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | SUB BAGIAN TATA USAHA	
9	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | SUB BAGIAN TATA USAHA	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
10	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	2	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | SEKSI PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS	
11	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	
12	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
13	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	
14	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	2	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA	TIDAK DAPAT DIISI PELAMAR DISABILITAS
15	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	2	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | BIDANG PENCEGAHAN	TIDAK DAPAT DIISI PELAMAR DISABILITAS

16	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	D-IV AGROBISNIS PERIKANAN / D-IV AKUAKULTUR / D-IV BUDIDAYA PERAIRAN / D-IV BUDIDAYA PERIKANAN / D-IV ILMU KELAUTAN / D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN / S-1 AGROBISNIS PERIKANAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 AKUAKULTUR / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN / S-1 PERIKANAN / S-1 TEKNIK KELAUTAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 TEKNOLOGI KELAUTAN / S-1 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN / S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR	WALIKOTA BIMA | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN| BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	
17	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	2	D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV FISIOTERAPI / D-IV KEBIDANAN / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN / S-1 FARMASI / S-1 FARMASI KLINIS / S-1 GIZI / S-1 KEBIDANAN / S-1 KEDOKTERAN / S-1 KEDOKTERAN GIGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 PSIKOLOGI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	
18	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	1	D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV FISIOTERAPI / D-IV KEBIDANAN / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN / S-1 FARMASI / S-1 FARMASI KLINIS / S-1 GIZI / S-1 KEBIDANAN / S-1 KEDOKTERAN / S-1 KEDOKTERAN GIGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 PSIKOLOGI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
19	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	1	D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV FISIOTERAPI / D-IV KEBIDANAN / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN / S-1 FARMASI / S-1 FARMASI KLINIS / S-1 GIZI / S-1 KEBIDANAN / S-1 KEDOKTERAN / S-1 KEDOKTERAN GIGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 PSIKOLOGI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
20	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI	WALIKOTA BIMA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	
21	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	WALIKOTA BIMA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI	
22	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	WALIKOTA BIMA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
23	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	WALIKOTA BIMA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
24	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	1	D-IV ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV GEOLOGI / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN / D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV PERTANAHAN / D-IV PLANOLOGI / D-IV TEKNIK GEODESI / D-IV TEKNIK GEOLOGI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 GEOLOGI / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI / S-1 REKAYASA GEODESI / S-1 REKAYASA GEOLOGI / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK SIPIL	WALIKOTA BIMA | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERTANAHAN	
25	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KUMBE | SUB BAGIAN TATA USAHA	

26	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
27	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | SUB BAGIAN TATA USAHA	
28	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS PENANAE | SUB BAGIAN TATA USAHA	
29	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MPUNDA | SUB BAGIAN TATA USAHA	
30	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN UMUM	
31	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
32	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | SEKRETARIAT | SUBBAGIAN UMUM	
33	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	
34	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS RASANAE TIMUR | SUB BAGIAN TATA USAHA	
35	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
36	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM	
37	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS PARUGA | SUB BAGIAN TATA USAHA	
38	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
39	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

40	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOLO | SUB BAGIAN TATA USAHA	
41	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
42	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
43	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | BIDANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
44	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | SEKRETARIAT | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
45	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS JATIBARU | SUB BAGIAN TATA USAHA	
46	PENATA KEPROTOKOLAN	2	D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KOMUNIKASI MASSA / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	WALIKOTA BIMA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL	
47	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	3	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
48	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	2	S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV ILMU KOMPUTER / D-IV TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI / D-IV GEOLOGI / S-1 GEOLOGI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	WALIKOTA BIMA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA MARGA	
49	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	1	S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU GEOGRAFI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK PERMINYAKAN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK SIPIL	WALIKOTA BIMA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
50	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	1	S-1 ILMU MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT / D-IV ILMU MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT / D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN / D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK MESIN	WALIKOTA BIMA | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PERHUBUNGAN | SEKSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
51	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	D-III AGRIBISNIS PERIKANAN / D-III BUDIDAYA PERAIRAN / D-III BUDIDAYA PERIKANAN / D-III KELAUTAN / D-III MANAJEMEN BISNIS PERIKANAN / D-III MEKANISASI PERIKANAN / D-III NAUTIKA / D-III PERIKANAN / D-III TEKNIK PERKAPALAN / D-III TEKNOLOGI AKUAKULTUR / D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERAIRAN / D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN / D-III TEKNOLOGI PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN	WALIKOTA BIMA | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN TANGKAP	

52	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	1	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | SEKSI PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS	
53	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	1	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	
54	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	2	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOLO | SUB BAGIAN TATA USAHA	
55	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	2	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KEPERAWATAN / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS RASANAE TIMUR | SUB BAGIAN TATA USAHA	
56	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	2	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS JATIBARU | SUB BAGIAN TATA USAHA	
57	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	1	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	
58	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	1	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	
59	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	1	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATURIUM KESEHATAN DAERAH DAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN | SUB BAGIAN TATA USAHA	
60	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	2	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEPERAWATAN / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS PENANAE | SUB BAGIAN TATA USAHA	
61	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	1	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | SUB BAGIAN TATA USAHA	
62	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	2	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS PARUGA | SUB BAGIAN TATA USAHA	
63	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	2	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MPUNDA | SUB BAGIAN TATA USAHA	

64	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	2	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	WALIKOTA BIMA | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KUMBE | SUB BAGIAN TATA USAHA	
65	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN / S-1 HORTIKULTURA / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 ILMU TANAH / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 PSIKOLOGI MASYARAKAT / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	WALIKOTA BIMA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG TATA LINGKUNGAN	
66	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	S-1 HORTIKULTURA / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 ILMU TANAH / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 PSIKOLOGI MASYARAKAT / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	WALIKOTA BIMA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
67	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	S-1 HUKUM	WALIKOTA BIMA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM	
68	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR MINUM	
69	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	2	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 HUKUM SYARIAH / S-1 ILMU POLITIK / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI SYARIAH / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV KEAMANAN DAN INTELIJEN SIBER / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	WALIKOTA BIMA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	TIDAK DAPAT DIISI PELAMAR DISABILITAS
70	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	1	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 HUKUM SYARIAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI SYARIAH / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV KEAMANAN DAN INTELIJEN SIBER / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	WALIKOTA BIMA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	TIDAK DAPAT DIISI PELAMAR DISABILITAS
71	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	2	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	TIDAK DAPAT DIISI PELAMAR DISABILITAS
72	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	2	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA	TIDAK DAPAT DIISI PELAMAR DISABILITAS
73	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	2	SLTA/SMA SEDERAJAT	WALIKOTA BIMA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	TIDAK DAPAT DIISI PELAMAR DISABILITAS
74	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	D-III PERANCANGAN PERMAINAN / D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III TEKNOLOGI PERMAINAN	WALIKOTA BIMA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | BIDANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	

Pj. WALIKOTA BIMA,

Drs. MUKHTAR, MH